

**SEPAK TERJANG SARWO EDHIE WIBOWO DALAM MENJAGA
STABILITAS KEAMANAN NASIONAL INDONESIA (1965-1989)**

Oleh:

Acep Nurodin, Didin Saripudin, Moch. Eryk Kamsori¹

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai “Sepak Terjang Sarwo Edhie Wibowo dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Indonesia (1965-1989)”. Masalah utama yang diangkat dalam skripsi ini adalah “Bagaimana Sepak Terjang Sarwo Edhie Wibowo dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Indonesia (1965-1989)”. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan metode *historis* melalui tahap-tahap seperti pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Untuk memperdalam analisis, peneliti menggunakan pendekatan interdisipliner melalui kajian ilmu sosiologi dan politik. Masa jabatan Sarwo Edhie Wibowo sebagai Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) merupakan masa yang paling mencuri perhatian. Berdasarkan perintah dari PANGKOSTRAD Mayor Jenderal Soeharto, Sarwo Edhie berhasil mengatasi percobaan kudeta oleh kelompok yang mengatasnamakan sebagai Gerakan 30 September. Memasuki masa Orde Baru, Sarwo Edhie menjabat sebagai Pangdam II/Bukit Barisan dan membantu operasi pembekuan PNI di Sumatra Utara hingga kemudian menjadi Pangdam XVII/Cendrawasih. Sebagai Pangdam Cendrawasih, Sarwo Edhie berperan dalam menyukseskan pelaksanaan PEPERA. Di penghujung karirnya, Sarwo Edhie menjabat sebagai Gubernur AKABRI, Duta Besar di Korea Selatan, Kepala BP7, dan terakhir adalah anggota DPR/MPR. Hingga akhirnya pensiun dan meninggal dunia pada 10 November 1989.

Kata Kunci: G30S, Keamanan Nasional, PKI, RPKAD, Sarwo Edhie Wibowo.

ABSTRACT

This research entitled “The Action of Sarwo Edhie Wibowo in Maintaining Stability of Indonesia National Security (1965-1989)”. The Main problem in this research is “How was Sarwo Edhie Wibowo’s Action in Maintaining Indonesian National Security (1965-1989)”. The Research methodology used in this research is historical method

¹ Acep Nurodin adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, Didin Saripudin sebagai dosen pembimbing I, dan Moch. Eryk Kamsori sebagai pembimbing II. Peneliti dapat dihubungi melalui surat elektronik di acep.nurodin@student.upi.edu

through many steps such as heuristic, source criticism, interpretation and historiography. The researcher used interdisciplinary approaches through sociology and politic study. Sarwo Edhie Wibowo's position as Commander of The Command of The Army Regiment (RPKAD) was most attracted era. Based on the command of PANGKOSTRAD Major General Soeharto, Sarwo Edhie succeeded to overcome coup of 30th September Movement. Entering New Order era, Sarwo Edhie officiated as Pangdam II/Bukit Barisan and helped in PNI stopping operation in North Andalas and then became Pangdam XVII/Cendrawasih. As Pangdam XVII/Cendrawasih, Sarwo Edhie had a role in succeeding PEPERA execution. In the end of his career, Sarwo Edhie became Governor of AKABRI, ambassador in South Korea, Head of BP7, and last as member of DPR/MPR. Until the end, he was retired and passed away at 10th November 1989.

Keywords: *G30S, National Security, PKI, RPKAD, Sarwo Edhie Wibowo*

PENDAHULUAN

Masalah pertahanan dan menjaga stabilitas keamanan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Bagi negara yang baru terbentuk, peran militer menjadi sangat sentral untuk menjaga negara dari rongrongan pihak luar maupun pihak dalam yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara tersebut. Perkembangan yang berjalan di Indonesia antara tahun 60-an merupakan suatu pergulatan sengit, antara kepentingan politik yang berhaluan militer dan PKI. Akhir dari kemelut itu ialah meletusnya peristiwa yang mengguncang stabilitas keamanan nasional Indonesia, yaitu peristiwa Gerakan Tiga Puluh September (GESTAPU) tahun 1965.

Menanggapi aksi Gerakan 30 September, Jenderal Soeharto menggerakkan pasukan Kostrad serta kesatuan-kesatuan yang tidak mendukung Gerakan 30 September seperti Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan juga menyadarkan pasukan-pasukan yang telah diperalat oleh PKI. RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhie Wibowo dipercaya merebut stasiun RRI dan kantor besar telekomunikasi, dan berhasil dengan baik (Lubis, 2012, hlm. 94). Tidak hanya itu, Sarwo Edhie bersama RPKAD kemudian ditugaskan untuk membasmi PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Namun kegemilangan Sarwo Edhie Wibowo dalam mengatasi gejolak politik

yang mengguncang keamanan nasional di penghujung era pemerintahan Presiden Soekarno tidak membuat dirinya dijadikan anak emas di era pemerintahan presiden Soeharto. Hal ini memberikan ketertarikan kepada peneliti untuk mengkaji tentang sepak terjang Sarwo Edhie Wibowo dalam menjaga stabilitas keamanan nasional Indonesia.

Untuk membantu peneliti dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku dan beberapa konsep yang digunakan sebagai landasan berpikir, diantaranya adalah buku karya Bahrudin Supardi yang berjudul "*Biografi Sarwo Edhie Wibowo: Kebenaran Diatas Jalan Tuhan*", kemudian buku karya Peter Kasenda yang berjudul "*Sarwo Edhie dan Tragedi 1965*", serta konsep *peran, keamanan nasional, dan stabilitas politik*.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode historis atau metode sejarah sebagai suatu cara dalam menjelaskan fenomena masa lalu yang dibantu dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Metode

historis adalah suatu proses menguji, menjelaskan, dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986, hlm. 32). Pernyataan tersebut sama dengan pendapat Sjamsuddin (2007, hlm. 17-19) yang menyatakan bahwa metode historis merupakan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis dan sistematis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau.

Langkah awal dalam penelitian sejarah adalah menentukan topik penelitian. Dalam menentukan topik penelitian ini, peneliti mencari berbagai informasi baik dari buku-buku, maupun sumber-sumber lainnya. Pencarian informasi dilakukan dengan cara mencari berbagai referensi dari buku-buku mengenai Sarwo Edhie Wibowo dari berbagai perpustakaan, artikel-artikel dan *e-book* melalui pencarian di situs internet. Dalam tahapan pengumpulan sumber ini, peneliti membaginya ke dalam tiga sub bab sesuai dengan pencarian akan sumber-sumber yang relevan tersebut, pertama pencarian di situs internet, pencarian di perpustakaan-perpustakaan, dan yang terakhir dari koleksi pribadi penulis.

Kemudian langkah yang kedua ialah mengusut semua evidensi yang relevan dengan topik penelitian. Langkah pertama yang peneliti lakukan dalam langkah kritik sumber ini adalah dengan membuat catatan-catatan penting mengenai kajian yang akan dibahas sesuai dengan topik penelitian yang telah dipilih yakni tentang Sarwo Edhie Wibowo dan stabilitas keamanan nasional Indonesia pada 1965-1989. Setelah membuat catatan-catatan penting, peneliti kemudian mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan dengan menganalisis data yang didapat agar diperoleh fakta yang terpercaya. Kemudian peneliti menyusun fakta-fakta dari sumber-sumber atau evidensi-evidensi dan menyajikannya dalam suatu bentuk tulisan. Lalu peneliti merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah dari fakta-fakta yang didapatkan setelah melakukan tahapan-tahapan yang telah dilakukan atau disebut juga dengan historiografi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahun 1965 bisa dibilang tahun yang melambungkan nama Sarwo Edhie Wibowo. 1 Oktober 1965 dini hari terjadi

sebuah peristiwa berdarah yang telah mengguncang Kota Jakarta, yaitu penculikan terhadap beberapa orang perwira tinggi AD seperti Letjend Ahmad Yani, Brigjend D. I. Pandjaitan, Mayjend Suprpto, Mayjend Harjono M. T., Brigjend Sutojo, Mayjend S. Parman (Pusat Penerangan AD, 1965, hlm. 9-8). Penculikan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September. Militer AD tentu tidak tinggal diam, Mayor Jenderal Soeharto langsung mengambil tindakan dengan cara menggerakkan pasukan Kostrad serta kesatuan-kesatuan yang tidak mendukung Gerakan 30 September seperti RPKAD. Sarwo Edhie yang ketika itu menjabat sebagai Komandan RPKAD mendapat tugas dari Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto untuk melakukan penyerbuan dalam upaya merebut kembali gedung RRI dan Kantor telekomunikasi yang telah dikuasai oleh Gerakan 30 September (Subroto, 2009, hlm. 112). Dua kompi pasukan Sarwo Edhie mulai melakukan pergerakan operasi perebutan Gedung RRI dan Kantor Telekomunikasi. Pasukan Sarwo Edhie sebelum berangkat telah diberi pesan oleh Mayor Jenderal Soeharto bahwa dalam upaya mengambil

alih sebisa mungkin menghindari terjadinya pertumpahan darah. Menjelang maghrib, kompi Kapten Heru menyerang Kantor Telekomunikasi, sedangkan kompi Kapten Urip menyerbu Gedung RRI (Redaksi Tempo, 2012, hlm. 4). Tanpa perlawanan yang berarti, kedua tempat tersebut berhasil direbut kembali. Pada hari yang sama atas perintah Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto, Sarwo Edhie memimpin pasukan RPKAD bergerak untuk mengamankan Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah yang merupakan tempat berkumpulnya pemimpin-pemimpin Gerakan 30 September. Kurang lebih dalam waktu 24 jam Pangkalan Udara Halim berhasil dikuasai pasukan RPKAD dan berhasil memukul mundur para pemimpin PKI yang kemudian melarikan diri (Kasenda, 2015, hlm. 66-67).

Sepintas keadaan di Jakarta berhasil dikuasai dan diamankan, namun kondisi yang sebenarnya terutama di daerah-daerah menjadi tidak terkendali dan menjadi sangat rumit. Setelah ditegaskan oleh Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto bahwa Gerakan 30 September didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, seakan-akan memberi legalitas untuk menumpas PKI (Lubis, 2012, hlm. 101). Akibatnya,

terjadilah pembersihan unsur-unsur PKI di Jawa Tengah, Jawa timur dan Bali. Wahyu Wirawan dalam sebuah Jurnal *Historia Vitae* vol 23 (2) 13 berjudul *Peran Militer Dalam Gerakan Massa dan Pembunuhan Massal di Jawa-Bali* mengatakan bahwa:

Pembunuhan ini berpola dan terstruktur, pertama pembentukan organisasi massa, melakukan gerakan sosial anti PKI, dan akhirnya pembunuhan massal. Pada bulan Oktober, pembunuhan terjadi di Jawa Tengah, selanjutnya pada bulan November merembet ke Jawa Timur, dan baru pada bulan Desember terjadi di Pulau Bali (Wirawan, 2009, hlm. 6).

Mengetahui situasi di daerah-daerah tersebut, Sarwo Edhie meminta agar dirinya bersama RPKAD segera ditugaskan, Mayor Jenderal Soeharto pun mengirimkan pasukan RPKAD dibawah pimpinan Sarwo Edhie Wibowo (Redaksi Tempo, 2012, hlm. 14). Dalam upaya menumpas Gerakan 30 September di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sarwo Edhie tidak hanya menggunakan pasukan RPKAD, ia juga membakar semangat warga non militer yang anti PKI untuk tidak ragu menumpas para pendukung PKI sampai ke akar-akarnya, sehingga muncullah gerakan massa pemburu PKI. Selain itu, Sarwo Edhie melakukan pelatihan militer kepada para sukarelawan dari ormas-ormas anti

PKI. Mereka kemudian dibebaskan untuk menculik dan membunuh orang tanpa perlu khawatir akan ditangkap aparat Negara karena telah melakukan tindakan kriminal (Roosa dkk, 2004, hlm. 48-49). Satu hal menarik yang dilakukan oleh Sarwo Edhie Wibowo di setiap kota yang di datangi oleh RPKAD adalah ia selalu melakukan konvoi militer yang ia namakan *Show Of Forces*. Inti dari *Show Of Forces* dalam hal ini adalah untuk memperlihatkan betapa kuatnya militer Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu takut kepada angkatan bersenjata PKI. Selain itu, konvoi militer ini juga bisa mendekatkan RPKAD dengan masyarakat, sehingga terbentuk kekuatan yang semakin kokoh antara militer dan masyarakat, suatu pemikiran cerdas dari seorang Sarwo Edhie Wibowo. Dengan kekuatan militer dan gerakan massa anti PKI, Sarwo Edhie berhasil menumpas Gerakan 30 September dalam waktu singkat.

Di Bali, terjadi hal yang agak berbeda dengan di Jawa. Apabila di Jawa aksi-aksi penumpasan oleh masyarakat non militer baru gencar dilakukan setelah kedatangan RPKAD memberikan angin segar yang mendorong masyarakat untuk menumpas PKI, serta adanya pelatihan militer kepada

para sukarelawan. Di Bali aksi penumpasan Gerakan 30 September oleh masyarakat non militer sudah dilakukan sebelum kedatangan RPKAD. Hal ini dikarenakan memang sudah ada persetujuan antara PKI dan PNI di Bali. Ketika meletusnya peristiwa Gerakan 30 September, konflik antara PKI dan PNI pun memanas dan mencapai puncaknya pada pertengahan bulan November hingga terjadilah penumpasan PKI dan ormasnya oleh para tameng PNI, GP Anshor dan kelompok anti PKI lainnya (Lubis, 2012, hlm. 112). Menurut Geoffrey Robinson dalam Kasenda (2015), para perwira dari Jawa beranggapan kampanye mengganyang PKI di Bali belum dilaksanakan dengan benar. Jadi memimpin dan menyalurkan penghancuran PKI bukan berarti kaum komunis tidak lagi dibunahi, tapi pembunuhan dilakukan dengan cara yang rapi dibawah kendali militer (Kasenda, 2015, hlm. 95). Dengan kata lain, misi RPKAD di Bali adalah untuk mengarahkan, memimpin, dan mengorganisir penumpasan supaya berjalan dengan rapi, bukan menghentikannya. Pembantaian massal dalam skala besar pada bulan Januari 1966 sudah dihentikan. Namun, disana-sini

secara sporadis, pembantaian masih berjalan. Operasi pembersihan terus dilancarkan. Ingatan akan kekejaman PKI dipertahankan hingga penghujung masa pemerintahan Orde Baru.

Memasuki masa pemerintahan Orde Baru, Sarwo Edhie Wibowo masih menjalani karir di bidang militer, tetapi bukan lagi sebagai Komandan RPKAD. Sarwo Edhie dipindahkan ke Medan untuk diangkat menjadi Pangdam II/Bukit Barisan (1967) dalam membantu operasi pembekuan PNI di Sumatra Utara sebagai usaha untuk melenyapkan pengaruh Soekarno. Keruntuhan kekuasaan Presiden Soekarno menyeret PNI karena kedekatan partai berkepala banteng itu dengan Soekarno. Banyak kesatuan aksi massa dan parpol yang menuntut pembubaran PNI. Di lain pihak, PNI juga menghadapi kuatnya pengaruh posisi penguasa di daerah, khususnya para Panglima Kodam (Pangdam). Sikap anti-PNI kemudian ditunjukkan juga oleh Pangdam Bukit Barisan Brigjen Sarwo Edhie Wibowo ketika menolak permohonan audiensi dari pimpinan PNI di Sumatera Utara. Ia juga menolak permohonan serupa yang diajukan oleh

pimpinan pusat PNI Sunawar Sukawati (Kasenda, 2015, hlm. 173).

Mengasosiasikan PNI dengan Soekarno dan PKI, Brigjen Sarwo Edhie Wibowo menggagas pembekuan PNI. Adapun alasan yang digunakan Sarwo Edhie dalam membekukan partai ini adalah karena adanya tuntutan dari berbagai organisasi massa, partai politik, dan kesatuan aksi. Sarwo Edhie akan terus melakukan operasi pembekuan terhadap partai yang selama perjalanannya dekat dengan Soekarno terutama yang masih berpegang pada ajaran *Marxisme-Marhaenisme*. Pemikiran Sarwo Edhie ini ternyata mendapat dukungan dari Pejabat Panglima AD Jenderal Maraden Pangabean dan juga Mayor Jenderal Kusno Utomo, sehingga kemudian menyebabkan Sarwo Edhie menjadi pusat kebijakan yang diterapkannya dalam operasi pembekuan PNI di Sumatra. Sarwo Edhie mengusulkan bahwa PNI lebih baik meneruskan perjuangannya dalam bidang pekerjaan dan ke-ormasan saja karena sudah tidak memiliki tempat di bidang politik (Sjamsuddin, 1984, hlm. 180).

Selain membekukan PNI di Sumatera, Sarwo Edhie juga mengusulkan agar PNI dibubarkan. Tetapi usulan Sarwo

Edhie mengenai PNI ini bertentangan dengan kehendak Soeharto (Redaksi Tempo, 2012, hlm. 64). Soeharto lebih memilih untuk memperlemah dan mengendalikan partai ini. Selanjutnya Presiden Soeharto memberikan instruksi kepada penguasa daerah untuk membantu PNI berkonsolidasi dan kristalisasi serta menyesuaikan diri dengan Orde Baru. Brigjen Sarwo Edhie Wibowo sebagai penguasa daerah menerima dan menjalankan instruksi itu kendati tidak terlalu setuju dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Hal tersebut dirasa oleh Sarwo Edhie sangat kontra mengingat PNI yang memiliki ajaran-ajaran dari *Marxisme*. Jakarta, yang melihat Sarwo Edhie setengah hati, memangkas kewenangannya. Akhir Desember 1967, Kepala Staf Komando Wilayah Sumatera Brigadir Jenderal J. Muskita mengambil alih kepemimpinan Sarwo Edhie. Tidak lama kemudian Sarwo Edhie dipindahkan ke Irian Barat sebagai Panglima Kodam Cendrawasih (Crouch dalam Kasenda, 2015, hlm. 176).

Pada masa jabatannya sebagai Pangdam Cendrawasih ini Sarwo Edhie Wibowo melaksanakan perannya dalam memadamkan aksi-aksi gerakan separatis

guna menyukseskan pelaksanaan PEPERA. Menjelang PEPERA, seluruh persiapan-persiapan Indonesia untuk kegiatan tersebut dipercayakan kepada Pangdam Cendrawasih Brigadir Jenderal Sarwo Edhie Wibowo yang mengakui mempunyai tidak lebih dari 6000 orang pasukan pada waktu itu. Dalam bulan-bulan pertama tahun 1969, kekuatan militer ini ditingkatkan menjadi 10.000 orang, dan kemudian kekuatan pasukan saat pelaksanaan PEPERA ditingkatkan lagi menjadi 16.000 orang (Drooglver, 2010, hlm. 711). Dengan pasukan sebanyak ini, sudah sangat cukup untuk mengendalikan kekacauan yang mungkin terjadi jelang PEPERA. Brigjen Sarwo Edhie Wibowo menggelar Operasi Wibawa dengan tugas utama memenangkan PEPERA, menumbuhkan dan memelihara kewibawaan pemerintah. Untuk tujuan itu, Kodam Cendrawasih melakukan sinkronisasi operasi tempur, intelijen dan territorial. Sejalan dengan ini, ia memerintahkan setiap Kodim mempersiapkan kekuatan tempur agar bisa digunakan jika diperlukan (Kasenda, 2015, hlm. 176).

Gangguan yang paling meresahkan ketika Brigjen Sarwo Edhie menjabat

sebagai Pangdam Cendrawasih adalah adanya sekelompok gerakan separatis yang dilakukan oleh pasukan Lodewijk Mandjaitan yang sudah dapat dipastikan akan membahayakan berlangsungnya pelaksanaan PEPERA (Redaksi Tempo, 2012, hlm. 39). Untuk meredam gangguan keamanan tersebut, Brigjen Sarwo Edhie Wibowo selaku Panglima Kodam Cendrawasih memutuskan menggerakkan pasukannya untuk menghancurkan basis pasukan Lodewijk Mandjaitan. Tetapi tentu saja ini bukan hal yang mudah karena medan di Irian Barat yang bergunung-gunung dan berhutan-hutan lebih memberikan keuntungan kepada pasukan Lodewijk Mandjaitan yang memang telah terbiasa dengan medan seperti itu. Menghadapi keadaan tersebut, sesuai dengan perintah Sarwo Edhie, pasukan Kodam Cendrawasih melakukan gerakan ofensif yang dilancarkan terus menerus hingga situasi berubah. Lambat laun daya tempur pasukan Lodewijk Mandjaitan semakin merosot dan posisi mereka terdesak. Ruang gerak mereka menjadi terjepit dan akhirnya mereka hanya bisa melarikan diri (Supardi, 2012, hlm. 212).

Untuk menghindari lebih banyak korban dari pertempuran, Brigjen Sarwo

Edhie Wibowo melalui pasukannya menyebarkan selebaran ke berbagai tempat yang berisikan anjuran bagi mereka untuk bersedia turun gunung untuk kembali ke kampung halaman mereka. Dijamin mereka tidak akan mendapat tuntutan atas apa yang telah mereka lakukan selama ini. Sebelumnya, Sarwo Edhie menegaskan bahwa pemberontak pasti hancur kalau dipukul terus, tetapi melihat bahwa mereka adalah saudara kita sendiri, maka kita coba panggil mereka agar kembali (Redaksi Tempo, 2012, hlm. 40). Tak hanya ahli dalam bertempur, sejak dari misinya menumpas Gerakan 30 September, Sarwo Edhie memang sangat ahli dalam urusan pendekatan seperti ini. Akhirnya Lodewijk Mandjaitan beserta pasukannya bersedia turun gunung. Perjuangan Sarwo Edhie dalam memimpin pasukannya menghadapi gerakan Lodewijk pun berakhir. Akhirnya berbagai upaya yang dilakukan Sarwo Edhie membuahkan hasil positif, hasil akhir dari pelaksanaan PEPERA secara aklamasi menyatakan Irian Barat bergabung dengan Indonesia.

Jabatan sebagai Pangdam Cendrawasih bisa dibilang sebagai jabatan terakhir Sarwo Edhie di lapangan Militer. Mulai dari tahun 1970, Sarwo Edhie

seolah-olah telah lepas dari lapangan perang militer. Sarwo Edhie seperti dijauhkan dari pusat kekuasaan dalam pemerintahan Orde Baru. Jabatan yang diberikan Sarwo Edhie pasca penumpasan G30S sangat jauh dari jalan menuju pimpinan seperti Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad), Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), dan bahkan Presiden.

Dipenghujung karirnya ini, Sarwo Edhie hanya menjabat sebagai Gubernur AKABRI, Duta Besar untuk Indonesia di Korea Selatan, Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), dan terakhir adalah anggota DPR/MPR mewakili Golkar. Namun keadaan tersebut tidak menghalangi Sarwo Edhie untuk tetap mengabdikan dirinya kepada Republik Indonesia meskipun jabatan yang dipegang Sarwo Edhie telah keluar dari jalur kemiliteran. Pekerjaan sebagai pemimpin dalam instansi-instansi politik dan organisasi kelompok dalam masyarakat tetap dijalani dengan penuh tanggung jawab hingga menjelang ia jatuh sakit karena stroke. Kondisi kesehatan

Sarwo Edhie yang tidak kunjung membaik hingga akhirnya pada dini hari tanggal 9 November 1989 ia menghembuskan nafasnya yang terakhir di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Kemudian ia dimakamkan pada tanggal 10 November di kota kelahirannya Purworejo, menandai berakhirnya pengabdian dirinya kepada bangsa Indonesia (Supardi, 2012, hlm. 269).

SIMPULAN

Sarwo Edhie Wibowo merupakan salah satu tokoh penting dalam proses lahirnya Orde Baru. Sarwo Edhie Wibowo dilahirkan di Desa Pangen Juru Tengah, Jawa Tengah dan memiliki karir militer yang cukup gemilang. Masa jabatannya sebagai Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) merupakan masa yang paling mencuri perhatian. Berdasarkan perintah dari PANGKOSTRAD Mayor Jenderal Soeharto, Sarwo Edhie berhasil mengatasi percobaan kudeta oleh kelompok yang mengatasnamakan sebagai Gerakan 30 September. Dalam menumpas Gerakan 30 September, Sarwo Edhie tidak hanya menggunakan pasukan RPKAD, ia juga membakar semangat warga non militer

yang anti PKI untuk tidak ragu menumpas para pendukung PKI sampai ke akar-akarnya, sehingga muncullah gerakan massa pemburu PKI. Selain itu, Sarwo Edhie juga melakukan pelatihan militer kepada para sukarelawan dari ormas-ormas anti PKI. Meskipun gerakan tersebut berhasil diatasi, situasi keamanan dan keadaan politik Indonesia terlanjur goyah dan mengakibatkan terjadinya peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Memasuki masa Orde Baru, Sarwo Edhie dipindah ke Medan dan diangkat menjadi Pangdam II/Bukit Barisan dalam membantu operasi pembekuan PNI di Sumatra Utara dan kemudian menjadi Pangdam XVII/Cendrawasih. Pada masa jabatannya sebagai Pangdam Cendrawasih ini Sarwo Edhie Wibowo melaksanakan perannya dalam memadamkan aksi-aksi gerakan separatis guna menyukseskan pelaksanaan PEPERA. Di penghujung karirnya, Sarwo Edhie menjabat sebagai Gubernur AKABRI, Duta Besar di Korea Selatan, Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), dan terakhir adalah anggota DPR/MPR hingga ia meninggal dunia pada 10 November 1989..

Beberapa hal tersebut bisa dikatakan jauh hubungannya dengan karir dalam bidang militer mengingat peranannya yang berhasil menumpas Gerakan 30 September 1965.

DAFTAR PUSTAKA

- Drooglver, P.J. (2010). *Tindakan Pilihan Bebas. Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gottschlak, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kasenda, Peter. (2015). *Sarwo Edhie dan Tragedi 1965*. Jakarta: Buku Kompas.
- Lubis, Nina H. (2012). *G 30 S Sebelum & Sesudah*. Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat.
- Pusat Penerangan Angkatan Darat. (1965). *Fakta-Fakta Persoalan Sekitar "Gerakan 30 September"*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Redaksi Tempo. (2012). *Sarwo Edhie Wibowo dan Misteri 1965*. Jakarta: Gramedia.
- Roosa, J. Ratih, A & Farid, Hilmar. (2004). *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir (Memahami Pengalaman Korban 65)*. Jakarta: ELSAM
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Sjamsuddin, Nazaruddin. (1984). *PNI dan Kepolitikannya*. Jakarta: CV. Rajawali

FACTUM
Volume 6, Nomor 1, April 2017

Subroto, Hendro. (2009). *Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*. Jakarta: Kompas.

Supardi, Bahrudin. (2012). *Biografi Sarwo Edhie Wibowo: Kebenaran di Atas Jalan Tuhan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.